

# KONFLIK PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG TUMPANG PITU DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2007-2009

## (*GOLD MINE CONFLICT OF GUNUNG TUMPANG PITUSUMBERAGUNG VILLAGE PESANGGARAN SUB DISTRICT BANYUWANGI REGENCY 2007-2009*)

Dyah Fatma Yuli A, Nawiyanto, Bambang Samsu Badriyanto  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember  
Email: snawiyanto@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konflik yang terjadi dalam eksplorasi dan rencana eksploitasi tambang emas Kawasan Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Dalam penggarapan penelitian ini digunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena benturan kepentingan perusahaan tambang dan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut dianggap masyarakat anti tambang membahayakan lingkungan dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar baik yang terkait dengan pertanian maupun perikanan. Kegiatan tambang emas yang ada di Gunung Tumpang Pitu oleh PT. Indo Multi Niaga (PT.IMN) juga ditolak oleh karena kawasan tersebut berfungsi sebagai hutan lindung. Kegiatan tambang emas tidak pelak lagi memunculkan perpecahan dan pertentangan dalam masyarakat, ada masyarakat yang setuju (pro) terhadap eksplorasi tambang emas, namun tidak sedikit pula yang menolak (kontra). Pusaran konflik tidak terbatas hanya pada kawasan sekitar tambang, melainkan melibatkan kekuatan atau kelompok-kelompok dari luar yang mengusung isu lingkungan.

**Kata Kunci:** pertambangan emas, konflik lingkungan, Banyuwangi

### Abstract

*The aim of this research is to describe and to analyze the conflicts taking place in the exploration and planned exploitation of gold mining of Gunung Tumpang Pitu, Sumberagung village, Pesanggaran district. In executing the research, the historical method is employed, by making a use of written and oral sources on the subject-matter. The results of this research show that the conflicts happened due to the conflicting interests between the mine enterprise and the adjacent communities. The mining activity is regarded by the anti mining groups as dangerous to the environment and the socio-economic life of the people, especially for those engage in agriculture and fishery. The gold mining activity in the Gunung Tumpang Pitu by PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) has also been rejected because of endangering the protected forest. The gold mining is inevitably causing unrest and tension among the society, there are pros and cons, and anti mining group is very strong. The conflict has broken not only among the people living in the adjacent areas, but also beyond the local environment, involving the external groups voicing environmental issues.*

**Keywords:** Mining: Mining, Conflict, Environment

### Pendahuluan

Tambang dan lingkungan adalah paduan kata yang bisa sejalan, sebagaimana disampaikan oleh pelaku

pertambangan. Di negara lain yang memiliki sejarah pertambangan lebih panjang, dan aturan lingkungan dengan standar yang tinggi seperti Kanada dan Amerika Serikat mungkin saja terjadi. Akan tetapi, di Indonesia

pertambangan dan lingkungan adalah dua hal yang seringkali sulit dipertemukan. Pertambangan berarti menggali permukaan tanah dan perut bumi. Saat menutup pertambangannya, sistem hidrologi sebuah kawasan tertentu akan terganggu. Kegiatan pertambangan untuk mengeruk bahan galian berharga dari perut bumi Indonesia telah berlangsung sejak lama. Alasan dasar kegiatan ini relatif tidak berubah yaitu alasan ekonomi. Hal lain yang juga relatif tidak berubah adalah konsep dasar pengelolaan. Perubahan yang terjadi lebih pada skala kegiatannya yang dari tahun ke tahun menunjukkan intensitas peningkatan dan perluasan.

Dari beberapa lokasi pertambangan yang berada di wilayah Jawa Timur salah satunya adalah di kawasan Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kawasan Gunung Tumpang Pitu adalah wilayah pegunungan yang merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Gunung Tumpang Pitu dikitari oleh 3 (tiga) Taman Nasional, yaitu di sebelah barat adalah Taman Nasional Meru Betiri, sebelah timur adalah Taman Nasional Alas Purwo, dan sebelah utara adalah Taman Nasional Baluran. Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki tiga kawasan pemangku hutan (KPH) seperti KPH Banyuwangi Barat, KPH Banyuwangi Utara, dan KPH Banyuwangi Selatan. Gunung Tumpang Pitu diperkirakan memiliki kandungan emas yang sangat tinggi dan dapat menghasilkan sekitar 70 ton /tahun (Yayasan ICDHRE, 2008:2). Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil kebijakan melakukan penambangan wilayah tersebut dengan melibatkan rekanan dari pihak swasta yaitu PT. Indo Multi Niaga (IMN). Namun di sisi yang lain kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu memiliki beberapa fungsi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat pada khususnya dan Banyuwangi pada umumnya (Yayasan ICDHRE, 2008:2). Beberapa fungsi tersebut antara lain:

- a) Sebagai *buffer zone* (kawasan penyangga kehidupan dengan fungsi ekologis seperti: penahan longsor, penyerapan air dan penahan angin).
- b) Sebagai kawasan hutan lindung.

Bagaikan sebuah operasi rahasia, sebuah perusahaan pertambangan yang bernama PT. Indo Multi Niaga (IMN) diam-diam hadir di dalam kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu tanpa adanya konsultasi publik sebelumnya. Hal inilah yang mengakibatkan muncul dan berkembangnya konflik yang ada di masyarakat Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

### Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan obyek yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah dengan model penulisan deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, menggambarkan secara akurat sifat-sifat kejadian, serta mengungkapkan dimensi kausalitas (Kartodirdjo, 1992:93-94). Model penulisan

semacam ini dianggap tepat untuk mengungkap secara memadai aspek genetis dan kausalitas konflik pertambangan emas di Desa Sumberagung. Sumber-sumber yang digunakan menyangkut baik berita-berita surat kabar, dokumen pribadi, dokumen resmi, maupun wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah terkait konflik pertambangan emas di Tumpang Pitu.

### Akar-Akar Konflik di Gunung Tumpang Pitu

Permasalahan tambang menjadi isu menarik untuk diteliti. Isu semacam ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Konflik pertambangan di Gunung Tumpang Pitu terkait dengan kegiatan PT IMN di wilayah Tumpang Pitu. Pada awalnya PT IMN masuk pada tahun 2005 dengan maksud mengeksplorasi potensi emas. Ijin alih fungsi kawasan PT IMN disetujui Pemkab Banyuwangi dan Menteri Kehutanan dengan SK No. 406/MENHUT-VII/PW/2007. Perijinan itu hanya untuk 2 tahun dari tahun 2007 – 2009 (Wawancara dengan Edi Sudjiman, 4 April 2012). Selama eksplorasi berlangsung status Amdal PT. IMN berubah dari eksplorasi menjadi eksploitasi dengan SK No. 005/758/429.0402/2007. Perubahan ini membuat masyarakat, LSM, dan anggota dewan kurang setuju, karena dinilai dapat merusak lingkungan bahkan habitat para penghuni hutan. Apalagi surat rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua DPRD dinilai cacat hukum karena tidak melalui sidang paripurna (<http://www.intelijen.co.id/liputan/1304-eksplorasi-emas-banyuwangi>, diunduh pada tanggal 23 Agustus 2012). Pro dan kontra yang terjadi di areal pertambangan menjadi sangat rumit ketika SK Bupati No. 188/05/05/KP/429.012/2007 tentang ijin eksplorasi tambang emas Gunung Tumpang Pitu mulai dirahasiakan. Sebagian masyarakat bersikukuh menolak adanya penambangan oleh PT. IMN karena dianggap membahayakan sektor perikanan laut dan pertanian yang dijadikan mata pencaharian hidup masyarakat sekitar.

### Respons Masyarakat Terhadap Eksplorasi Tambang Emas

Adanya ijin eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu yang dilaksanakan oleh PT. IMN membuat masyarakat resah. Masyarakat menilai adanya pertambangan sangat merugikan karena dapat merusak lingkungan. Akibat dari adanya pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, muncul perlawanan dalam masyarakat, sebagai ungkapan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Perlawanan ini ditunjukkan lewat aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Dusun Pancer serta masyarakat Desa Sumberagung. Keberatan akan potensi pencemaran yang diajukan masyarakat disanggah oleh pihak PT. IMN dengan mengatakan akan menerapkan sistem STD (*Submarine Tailing Disposal*) dalam pengolahan limbah pertambangan yang dianggapnya aman. Masyarakat menolak karena sistem ini dinilai dapat mengancam kehidupan nelayan Puger, Grajakan, dan Rajegwesi akibat tercemarnya air dan rusaknya biota laut (Wawancara dengan Edi Sudjiman, 4 April 2012).

Aksi para nelayan ini mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Wahana Lingkungan

Hidup (Walhi), misalnya memberikan dukungan dengan ungkapan menolak keras rencana penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu pada Maret 2008 (Media Partisipasi: edisi 35/th. IV/2009, 3). Penolakan penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu juga mendapat dukungan dari Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) (Media Partisipasi: edisi 35/th. IV/2009, 3).

Penolakan dan unjuk rasa anti tambang sering muncul menjadi pemberitaan di media massa. Diberitakan misalnya sekitar 5000 nelayan memboikot sosialisasi PT.IMN karena tidak ingin bernasib sama seperti masyarakat di Teluk Buyat (Wawancara dengan Edi Sudjiman, 4 April 2012). Nelayan di Banyuwangi bersatu untuk melawan eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Pada tanggal 20 Juni 2008 nelayan dan warga Kecamatan Muncar bersama-sama menggelar Istighosah di Pelabuhan Muncar. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan untuk menolak rencana pertambangan PT. Indo Multi Niaga (Wawancara dengan Edi Sudjiman, 4 April 2012).

Penolakan terhadap tambang juga terkait dengan potensi pertanian. Dari tahun ke tahun lebih dari separuh Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi berasal dari sector pertanian. Lebih dari separuh ongkos operasional pemerintah di Banyuwangi disangga oleh sektor pertanian. Pada tahun 2007 Banyuwangi telah berhasil memproduksi padi seberat 656.997,43 ton. Jika asumsi perkilogramnya seharga Rp. 3.000 maka nilainya setara dengan Rp. 1,97 trilyun (Rosdi, 2008).

## 5. Kronologi Konflik

Perseteruan yang terjadi antara masyarakat dan PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) berpusar hingga tingkat nasional. Pada tanggal 15 Oktober 2008 puluhan warga Pesanggaran mendatangi Gedung DPRD Jatim di Surabaya dengan tujuan menolak kegiatan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Mereka didampingi oleh Walhi Jatim dan beberapa Fraksi PDIP (Radar Banyuwangi: 16 Oktober 2008:28). Aksi tersebut membuat Fraksi PDIP segera berkoordinasi dengan Fraksi PDIP di DPRD Banyuwangi untuk membentuk Pansus. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Suswono juga menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu setelah mendengar keluhan para nelayan saat berkunjung di Gunung Tumpang Pitu pada tanggal 26 Oktober 2008.

Ketakutan kehilangan pekerjaan nelayan di Gunung Tumpang Pitu dibuktikan dengan adanya nelayan Grajakan yang mulai resah dengan adanya tambang karena ikan yang ada terkontaminasi limbah PT.IMN. Pihak PT. IMN membantah jika ikan tersebut mati dikarenakan limbah sebab PT.IMN mengaku telah mengelola limbah tambang dengan sistem yang benar dan ramah lingkungan sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup disekitarnya (Radar Banyuwangi: 27, Oktober, 2008: 25).

Pada tanggal 13 Nopember 2008 nelayan dan warga mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi untuk melakukan protes penolakan tambang di Gunung Tumpang Pitu Pesanggaran, Banyuwangi. Masyarakat datang dengan menggunakan 60 truck mulai pukul 09.30-10.30 WIB.

Setibanya di gedung DPRD Banyuwangi, massa langsung berorasi dan membentangkan atribut seperti poster dan spanduk yang berisikan tulisan-tulisan menuntut PT.IMN pergi dari Gunung Tumpang Pitu (Radar Banyuwangi: 14 November 2008: 29). Sekitar 20 orang warga menemui Wakil Ketua DPRD H.M. Eko Sukartono dan beberapa anggota DPRD untuk mendesak mereka agar mencabut ijin rekomendasi kegiatan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Atas desakan aksi warga tersebut akhirnya oleh Ketua DPRD H. A. Wahyudi dicabut.

Mendengar berita pencabutan surat rekomendasi tersebut, warga sangat senang dan melampiaskannya dengan aksi *longmarch* menuju Kantor Bupati Banyuwangi. Akan tetapi aksi mereka terhenti ketika polisi memblokir sekitar 200 meter dari arah selatan kantor Pemkab. Mereka tidak gentar dan berusaha mendesak Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari untuk mencabut ijin kegiatan tambang di Gunung Tumpang Pitu. Di gedung Pemkab Banyuwangi massa tidak berhasil untuk bertemu Bupati Ratna Ani Lestari. Mereka hanya bertemu dengan Asisten Sosial Ekonomi Hadi Sucipto. Hadi Sucipto tidak bisa memenuhi tuntutan massa untuk mencabut ijin kegiatan tambang, namun ia hanya bisa berjanji akan menyampaikan aspirasi warga serta mempertemukan warga kepada Bupati Ratna Ani Lestari dalam waktu yang singkat.

Pihak PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) tidak peduli dengan dicabutnya surat rekomendasi oleh DPRD Banyuwangi. PT. Indo Multi Niaga (PT.IMN) tetap melaksanakan kegiatan eksplorasi tambang sesuai dengan ijin Pemkab Banyuwangi. Sikap PT. IMN ini mendapat dukungan dari Forum Suara Blambangan (Forusba) yang tidak menyetujui adanya pencabutan surat rekomendasi ijin tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Pada tanggal 20 November 2008 Forusba mendatangi gedung DPRD. Sekitar 15 orang pengurus Forusba yang dipimpin oleh mantan ketua GP Ansor Banyuwangi Abdillah Rafsan Zani diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD H.M. Eko Sukartono dan beberapa anggota Komisi A. Forusba menuding DPRD tidak konsisten dengan sikapnya karena tekanan masyarakat membuat DPRD mencabut ijin rekomendasi tersebut. Forusba mengindikasikan adanya permainan kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan situasi Banyuwangi menjadi tidak kondusif (Radar Banyuwangi: 21, 11, 2008, 29).

Aksi tolak tambang tidak berhenti sampai disitu saja, pada tanggal 24 November 2008 Bumi Blambangan kembali diguncang dengan aksi demo tolak tambang emas. Aksi yang digelar massa tolak tambang tersebut serentak terjadi di dua tempat sekaligus. Demo yang pertama terjadi di Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran dengan melibatkan ratusan massa tolak tambang. Sedangkan demo yang kedua berlangsung di Gedung DPRD Banyuwangi. Di gedung DPRD ratusan massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pendukung Investasi Banyuwangi (Ampibi) mendesak DPRD agar mendukung semua bentuk investasi yang masuk di Banyuwangi (Radar Banyuwangi, 25 November 2008:29). Aksi demo kontra tambang yang ada di Balai Desa Sumberagung, Kepala Desa Sumberagung Sulthon Abdul Azis Sukari ternyata sudah sejak lama menolak rencana penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Sejak tanggal 8 April 2008 yang lalu, Kepala Desa

Sumberagung sudah menandatangani surat penolakan tambang emas yang ditujukan kepada Bupati Ratna Ani Lestari. Untuk meyakinkan massa yang ada, Kepala Desa Sumberagung membawa dan menunjukkan surat penolakan tambang emas kepada massa aksi tolak tambang. Setelah surat penolakan tersebut ditunjukkan, akhirnya massa bubar dengan perasaan lega karena Kepala Desa Sumberagung sudah menolak eksplorasi tambang emas yang ada di Dusun Pancer.

Bupati Ratna Ani Lestari dan muspida menggelar pertemuan tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Aula Rempeg Jogopati pada tanggal 3 Desember 2008. Pada dialog tersebut telah dihadiri oleh masa yang pro dengan tambang dan kontra, serta dihadiri oleh PT Indo Multi Niaga (PT IMN). Dalam pertemuan tersebut nelayan Muncar melakukan aksi *walk out* meninggalkan ruangan, Sedangkan nelayan Pancer dan nelayan Grajakan tidak beranjak dari tempat duduknya. Hal ini dilakukan karena nelayan Muncar merasa kecewa dengan agenda pertemuan yang telah disusun oleh Pemkab. Awalnya, mereka mengira kalau pertemuan tersebut untuk menjawab tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa menolak tambang pada tanggal 13 November 2008. Namun, pertemuan tersebut hanya membahas tentang sosialisasi tambang emas (Radar Banyuwangi, 25 November 2008:29). Hal itulah yang mengakibatkan nelayan Muncar langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruangan, mereka langsung menuju ke tempat parkir pemkab dan melampiaskan kekecewaannya.

Direktur Utama PT. Indo Multi Niaga (PT.IMN) Rezza Nazarudin dengan didampingi oleh Karmidi dan Joko Pitono sebagai penasehat, menggelar jumpa pers di Hotel Mira Banyuwangi usai pertemuan tersebut. Mereka menegaskan bahwa adanya pro-kontra dalam suatu perusahaan tambang itu sudah biasa, dan tambang emas PT. IMN untuk kepentingan warga Banyuwangi. PT. IMN juga menepis isu yang menuding bahwa PT. IMN merupakan makelar yang akan menjual tambang emas tersebut ke Australia dan membantah kalau PT. IMN akan merambah ke kawasan Meru Betiri.

Pada tanggal 15 Desember 2008 warga mendatangi lokasi eksplorasi tambang emas yang ada di Gunung Tumpang Pitu. Ratusan warga yang didominasi kalangan nelayan dari pantai Pancer untuk menduduki tambang emas hanya isapan jempol semata. Selama massa mendaki Gunung Tumpang Pitu mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI, mungkin hal inilah yang membuat masyarakat tidak anarkis. Dandim setempat merasa lega dengan adanya kondisi yang bersahabat antara masyarakat dengan PT. IMN. Situasi tersebut membuat Forum Mahasiswa Pemerhati Lingkungan mencoba menjembatani antara warga yang pro dan kontra. Pada tanggal 16 Desember 2008 forum mahasiswa tersebut mengadakan seminar yang bertajuk keuntungan dan kerugian tambang yang bertempat di Restoran Pondok Wina Banyuwangi. Dalam seminar tersebut membahas tentang bahaya tambang jika diteruskan, hal ini membuat masyarakat yang kontra terus mendesak agar perusahaan tambang dihentikan. Namun, pihak yang pro tambang tidak setuju karena, Bupati Ratna Ani Lestari tidak akan pernah mengabdikan. Selain itu mereka juga

mengatakan bahwa PT.IMN hanya melakukan eksplorasi saja (Radar Banyuwangi, 16 Desember 2008:39).

### **Dampak Eksplorasi Tambang Emas**

Dampak yang timbul akibat eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu secara sosiologis berupa terjadinya perpecahan dalam masyarakat yang berujung pada terjadinya konflik sosial. Masyarakat secara umum terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro dan kelompok anti tambang. Masyarakat yang semula relatif harmonis, berubah menjadi tegang dan diwarnai kecurigaan satu sama lain. Di antara kelompok pro-kontra tambang muncul sikap saling mengkritik memboikot, dan saling mengucilkan dalam berbagai kegiatan sosial sehari-hari, misalnya dalam acara kematian. Bahkan, akibat kehadiran tambang terjadi pula perpecahan dalam kelompok pengajian akibat pendirian dan penyikapan yang berbeda atas kehadiran kegiatan tambang korporat.

Dampak yang lebih merusak lingkungan adalah munculnya penambangan liar atau tradisional dan dilakukan tanpa ijin di sekitar wilayah eksplorasi PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN). Pertambangan liar merupakan perbuatan yang berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Pertambangan liar yang berada di Kampung 56 Dusun Ringinagung, Kecamatan Pesanggaran, telah menyebabkan aliran-aliran sungai rusak dan bahkan beberapa pohon di lereng Gunung Tumpang Pitu mulai rusak. Namun sayangnya penambangan liar ini tidak dapat dihentikan karena mereka beranggapan bahwa tanah tersebut milik mereka dan bukan milik PT. IMN, jadi mereka berhak untuk menambang emas di tanahnya.

### **Kesimpulan**

Rencana kegiatan pertambangan emas PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) berlokasi di Pulau Merah Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dengan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi seluas 11.621,45 ha. Kuasa pertambangan PT. Indo Multi Niaga (PT. IMN) ini masuk pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani Banyuwangi Selatan. Sejak 2007, PT. Indo Multi Niaga (IMN) mendapat empat kali perpanjangan eksplorasi dari Menteri Kehutanan. SK Menhut terakhir kali terbit Juli 2012 yang memberi ijin perusahaan itu melakukan eksplorasi seluas 1.987,80 hektare di kawasan hutan hingga 3 Juli 2014.

Masuknya pertambangan emas yang ada di Gunung Tumpang Pitu membuat resah warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran karena mereka beranggapan bahwa perusahaan pertambangan akan merusak lingkungan. Ancaman perusahaan tambang telah menimbulkan berbagai macam konflik di masyarakat. Nelayan dan petani menolak keras adanya pertambangan karena limbah perusahaan tambang akan mengancam matapencariannya. Berbagai macam aksi penolakan telah dilakukan oleh warga Pesanggaran dan Banyuwangi pada umumnya namun PT. IMN tetap beroperasi di kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu tanpa menghiraukan aspirasi rakyat. Pada akhir tahun 2009 aksi tolak tambang oleh warga diwujudkan

dengan munculnya pertambangan liar yang berada di Gunung Tumpang Pitu. Alasan mereka melakukan penambangan liar karena mereka sudah bosan dengan janji-janji pemerintah untuk mencabut ijin eksplorasi.

Rusaknya hutan lindung, tercemarnya laut, dan tercemarnya biota-biota laut merupakan suatu dampak yang besar akibatnya. Dampak lain juga dirasakan oleh warga sekitar, banyak warga yang dikucilkan akibat keluarganya pro tambang dan atau bekerja di perusahaan tambang milik PT. Indo Multi Niaga (IMN) yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu. Gaji yang besar membuat sebagian warga mendukung adanya perusahaan tambang milik PT. Indo Multi Niaga (IMN) tersebut. Kegiatan tambang telah memunculkan perpecahan di kalangan masyarakat dan ketidak harmonisan sosial yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Surat Kabar

Kartodirdjo, Sarton. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992

*Media Partisipasi*, "Bergabungnya Organisasi Mahasiswa, Dalam Barisan Tolak Tambang", Edisi 35/th. iV/2009.

*Radar Banyuwangi*, "Komisi IV DPRD RI Diwaduli Tambang Emas", tanggal 27 Oktober 2008.

*Radar Banyuwangi*, "Tambang Emas Masuk Pansus", tanggal 16 Oktober 2008.

*Radar Banyuwangi*, "Warga Siap Blokir Tambang Emas", tanggal 14 November 2008.

*Radar Banyuwangi*, "Protes Pencabutan Rekomendasi Tambang", tanggal 21 November 2008.

*Radar Banyuwangi*, "Sehari Dua Demo Tambang", tanggal 25 November 2008.

*Radar Banyuwangi*, "Tidak Anarkis Dandim Merasa Lega", tanggal 16 Desember 2008.

Rosdi, "Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi" dalam *Dokumen Pribadi* seminar tambang, 2007.

Yayasan ICDHRE, " Tanggal-Tanggal Pertambangan" dalam *Dokumen Pribadi*, 2008.

### Internet

"Eksplorasi Emas di Banyuwangi", <http://www.intelijen.co.id/liputan/1304-eksplorasi-emas-banyuwangi> diakses pada tanggal 23 Agustus 2012.

### Wawancara

Edi Sudjiman, Tegaldlimo 4 April 2012.